

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pembangunan merupakan sebuah proses dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni terciptanya masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera secara menyeluruh. Pembangunan tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti perubahan sosial, struktur masyarakat, dan intitusi nasional. Pembangunan ekonomi merujuk pada proses peningkatan pendapatan rill per kapita dalam jangka panjang, yang dibarengi dengan perbaikan sistem kelembagaan didalam pemerintahan, Keberhasilan pembangunan dapat dinilai melalui indikator-indikator yang mencerminkan dimensi-dimensi utama pembangunan. Dimensi tersebut meliputi aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, hukum, politik, serta keadilan sosial secara umum (Sabaha et al., 2024). Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah tidak maju. Terjadinya ketimpangan wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah (Zasriati, 2022).

Pembangunan ekonomi di indonesia mengalami banyak hambatan dalam merealisasikan pembangunan ekonomi yang merata disetiap wilayah, beberapa wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara diwilayah lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kekayaan alam yang dimiliki setiap wilayah seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan

pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar. Hanya saja kekayaan alam disetiap wilayah memiliki kandungan yang berbeda-beda di 34 Provinsi di Indonesia dan secara merata. Dari hal ini yang menyebabkan timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antarwilayah (Dewanto & Rahmawati, 2021). Negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi memiliki latar belakang perbedaan antarwilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda disetiap provinsi. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan dalam pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa Provinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

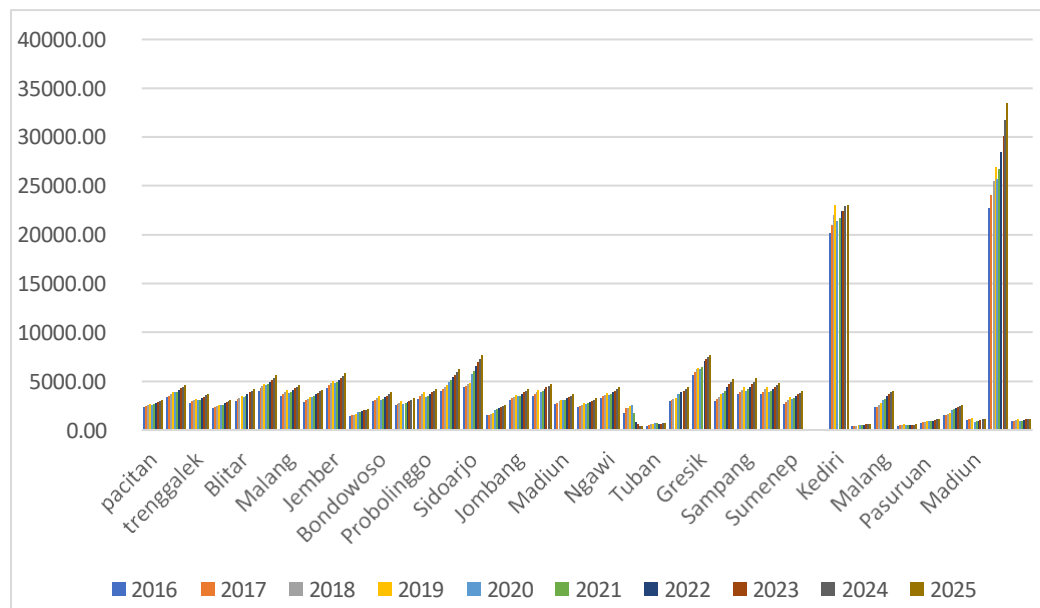
Hal ini yang menyebabkan terjadi ketimpangan pembangunan, ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia termasuk yang lebih tinggi dibandingkan dengan Negara maju, bahkan diantara sesama Negara berkembang. Peningkatan ketimpangan ini membawa implikasi negatif dan cenderung mendorong timbulnya kecemburuan sosial daerah terbelakang terhadap daerah maju yang dapat menimbulkan dampak politis bila tidak diatasi segera mungkin (Zasriati, 2022).

Pulau Jawa memiliki luas wilayah 46.428,57 km² terbagi menjadi 38 kabupaten/kota, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Namun demikian provinsi ini juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan antarwilayah. Ketimpangan antarwilayah merupakan kondisi terdapat perbedaan berupa tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi wilayah itu sendiri (Nurcahyo, 2021).

Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari permasalahan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah kota atau kabupaten yang ada di wilayah tersebut, Sehingga proses pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi di daerah tersebut dapat dimaksimalkan dan diminimalisir tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi tersebut ke arah pemerataan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan yang kompetitif di setiap daerah untuk dikembangkan (Setia, 2023).

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang sangat besar karena merupakan wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang besar, disisi lain provinsi Jawa Timur mengalami kondisi kemiskinan yang memprihatinkan, masalah tersebut menjadi kompleks dan sulit terselesaikan. Kondisi kemiskinan yang semakin memburuk tentunya akan menghambat kemajuan daerah terutama dalam bidang ekonomi seperti meningkatnya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Tingkat dan kualitas pendidikan yang rendah mengakibatkan lebih sedikit sumber daya manusia yang kompeten yang tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mendukung tuntutan pekerjaan mereka dan menghasilkan lebih sedikit uang (penghasilan). Selain itu, hasil pertumbuhan ekonomi yang tidak terbagi rata dan hanya dirasakan oleh sebagian golongan yang memiliki sumber daya akan menaikkan tingkat ketimpangan yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan (Hilmy Abdullah, 2023).

Gambar 1.1 Data PDRB Per Kapita Kabupaten/kota Di Jawa Timur Tahun 2016-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan gambar 1.1 data PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2016-2025, secara umum terlihat adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah. Jika dilihat secara komparatif, beberapa daerah menunjukkan tingkat PDRB per kapita yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang. Kabupaten/kota yang berada di wilayah dengan aktivitas industri dan perdagangan yang lebih kuat cenderung memiliki PDRB per kapita yang lebih besar. Sebaliknya, daerah yang struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian biasanya memiliki PDRB per kapita yang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan struktur ekonomi daerah turut mempengaruhi tingkat pendapatan per kapita masyarakatnya.

Selain itu, jika dibandingkan antar waktu, hampir seluruh kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan peningkatan PDRB per kapita dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang

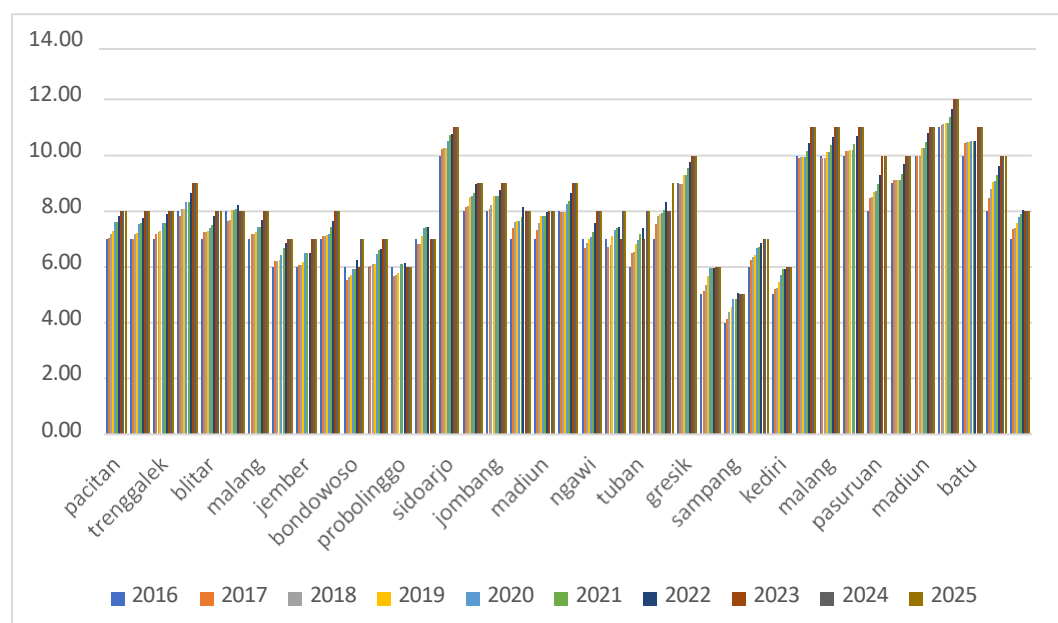
terus berlangsung, meskipun laju peningkatannya tidak selalu sama antar daerah. Beberapa wilayah mengalami peningkatan yang lebih cepat, sementara daerah lainnya meningkat tetapi dengan laju yang lebih lambat. Perbedaan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Jawa Timur masih belum merata. Daerah yang memiliki basis ekonomi yang kuat cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan daerah yang sumber daya ekonominya lebih terbatas. Kondisi ini menjadi salah satu indikator adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Jawa Timur.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan yaitu pendidikan, pendidikan diukur menggunakan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran dan juga pelatihan yang menghasilkan pengetahuan. Pembangunan ekonomi tidak saja ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik, tetapi juga sangat tergantung dari tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya. Ketimpangan dan kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang dihadapi di Indonesia. Sementara salah satu program dan juga tujuan pembangunan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat provinsi (Nefo Indra Nizar, 2023).

Pendidikan memiliki peran penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pendidikan yang baik dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih baik. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan, yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih menguntungkan. Pendidikan yang

tinggi dapat ditentukan oleh lamanya pendidikan atau tingkatnya, tetapi orang yang tidak belajar akan jauh dari kualitas manusia yang tinggi. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan pendidikan yang lebih baik, Pendidikan tinggi mempermudah mendapatkan pekerjaan, yang pada dasarnya dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Ashari et al., 2024).

Gambar 1. 2 Data Rata-Rata Lama Sekolah Di Jawa Timur Tahun 2016-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan gambar 1.2 Data rata-rata lama sekolah di Jawa Timur tahun 2016-2025 terlihat bahwa secara umum tingkat pendidikan masyarakat di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata antar wilayah sehingga masih terlihat perbedaan yang cukup jelas antara daerah perkotaan dan kabupaten. Wilayah kota umumnya memiliki tingkat RLS yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan, fasilitas pendidikan, serta peluang melanjutkan pendidikan di wilayah perkotaan

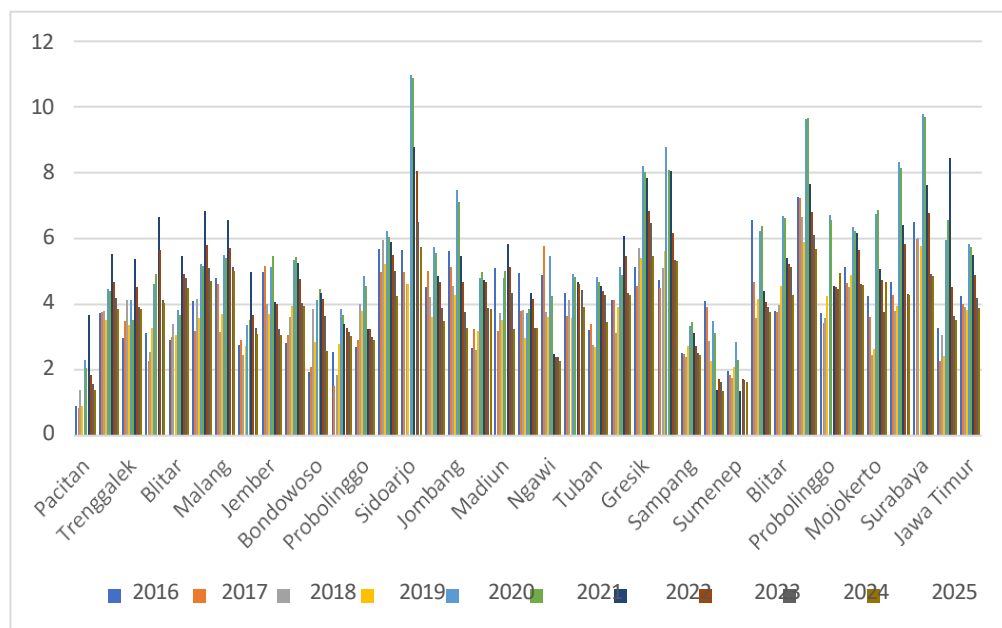
cenderung lebih baik daripada di wilayah kabupaten. Beberapa kota besar seperti Surabaya, Madiun, Malang, dan Mojokerto secara konsisten berada pada kelompok dengan tingkat RLS yang relatif tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa wilayah perkotaan memiliki sumber daya pendidikan yang lebih memadai, seperti ketersediaan sekolah, perguruan tinggi, serta dukungan infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap. Sebaliknya, sebagian besar wilayah kabupaten menunjukkan tingkat RLS yang relatif lebih rendah meskipun tetap mengalami peningkatan secara bertahap. Kabupaten di wilayah Madura seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep masih berada pada kelompok dengan rata-rata lama sekolah yang lebih rendah daripada daerah lain di Jawa Timur.

Di sisi lain, beberapa kabupaten seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto menunjukkan capaian RLS yang relatif lebih tinggi daripada kabupaten lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki perkembangan ekonomi dan kedekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi cenderung memiliki tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik. Sementara itu, kabupaten yang berada di wilayah yang relatif terpencil atau memiliki keterbatasan akses pendidikan cenderung memiliki tingkat RLS yang lebih rendah. Perbedaan tingkat rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini dapat berdampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah karena daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Oleh karena itu, peningkatan pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mengurangi

ketimpangan pembangunan di Jawa Timur.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah karena pengangguran tetap menjadi tantangan kritis bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya di provinsi-provinsi dengan kesenjangan spasial yang signifikan seperti Jawa Timur. Menurut BPS (2024), Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur di angka 4,55%, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,32%, menunjukkan kinerja penyerapan tenaga kerja yang relatif baik. Namun, angka agregat ini menyembunyikan kesenjangan yang parah antarwilayah. Kabupaten Sidoarjo mencatat sebesar 6,49%, diikuti oleh Gresik sebesar 6,45% dan Kota Malang sebesar 6,10%, sedangkan Pacitan. Kesenjangan lebih dari 4 poin persentase antarwilayah tertinggi dan terendah ini mencerminkan ketidaksetaraan mendasar dalam akses terhadap peluang kerja, distribusi investasi, dan pengembangan infrastruktur ekonomi di berbagai wilayah (Purwandari & Hanifa, 2025). Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa banyak orang tidak memiliki pendapatan tetap, yang dapat memperburuk ketimpangan pendapatan di masyarakat. Disisi lain, rendahnya tingkat pengangguran diharapkan dapat menjadikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta mengurangi ketimpangan pembangunan (Putri & Anggraini, 2024).

Gambar 1.3 Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Jawa Timur Tahun 2016-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan gambar 1.3 data Tingkat pengangguran terbuka (TPT) kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2016-2025 terlihat adanya dinamika yang cukup jelas antara daerah dengan tingkat pengangguran rendah dan tinggi. Secara umum, wilayah dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer seperti Pacitan, Sampang, dan Sumenep cenderung memiliki TPT yang relatif lebih rendah daripada daerah perkotaan dan kawasan industri. Sebaliknya, wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif lebih tinggi pada beberapa periode.

Jika dilihat secara komparatif antar waktu, sebelum pandemi kondisi TPT di sebagian besar wilayah cenderung stabil pada kisaran 3-5 persen. Namun, pada tahun 2020-2021 terjadi lonjakan pengangguran di hampir seluruh daerah akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi aktivitas ekonomi,

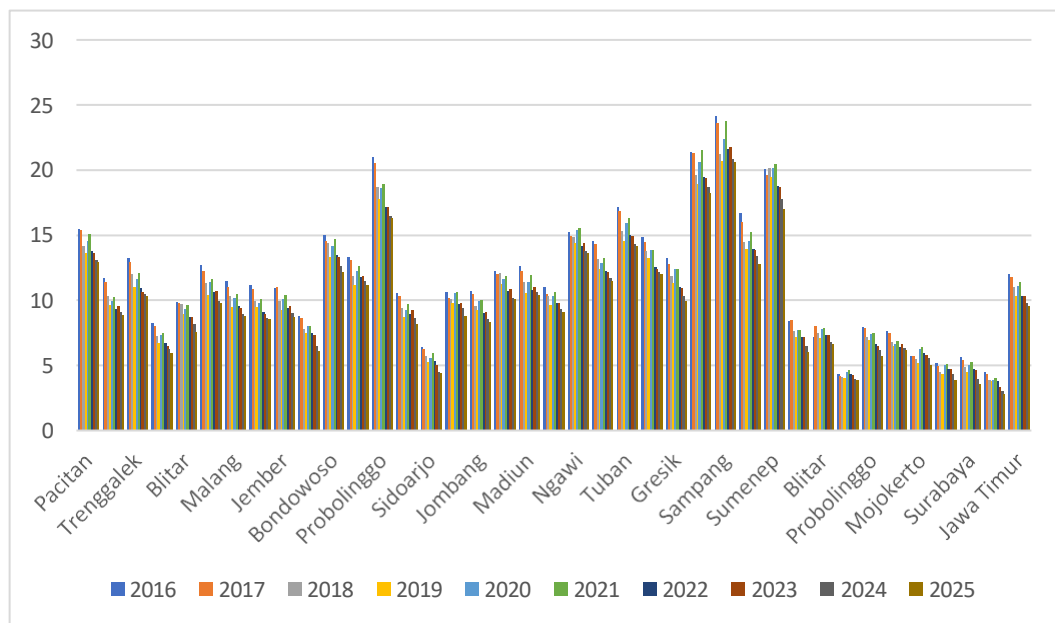
pembatasan mobilitas, serta penurunan penyerapan tenaga kerja. TPT di Sidoarjo mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai sekitar 10 persen pada tahun 2020-2021, Sementara Surabaya juga mengalami peningkatan hingga mendekati 10 persen. Fenomena serupa juga terlihat di Gresik, Bangkalan, dan Kota Malang yang mengalami kenaikan signifikan pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah dengan basis industri dan jasa modern justru paling rentan terhadap guncangan ekonomi ketika aktivitas produksi dan perdagangan terganggu. Setelah pandemi mulai mereda pada tahun 2022-2025, sebagian besar daerah menunjukkan tren penurunan TPT. Surabaya mengalami penurunan sekitar 7-9 persen pada masa pandemi menjadi sekitar 4-5 persen pada tahun 2024-2025. Sidoarjo juga menunjukkan perbaikan meskipun tingkat penganggurannya masih relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain. Sebaliknya, wilayah yang sejak awal memiliki TPT rendah seperti Pacitan, Pamekasan, dan Sumenep tetap menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif kecil sepanjang periode pengamatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan adanya paradoks dalam pembangunan ketenagakerjaan, yaitu situasi ketika daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi dan nilai PDRB yang relatif tinggi justru menunjukkan tingkat pengangguran terbuka yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat pada Surabaya dan Sidoarjo yang merupakan pusat kegiatan industri dan perdagangan di Jawa Timur. Meskipun kedua wilayah tersebut memiliki perkembangan ekonomi yang pesat, tingkat pengangguran yang tercatat lebih tinggi daripada daerah lain. Kondisi tersebut berkaitan dengan kemiskinan di perkotaan, dimana sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, keterampilan, serta akses terhadap kesempatan kerja yang layak. Akibatnya,

pertumbuhan aktivitas ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia sehingga tingkat pengangguran di wilayah tersebut tetap relatif tinggi.

Tingkat kemiskinan juga dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan karena tingginya angka kemiskinan di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Indonesia merupakan daerah yang masih belum berkembang dengan sumber daya alam terutama dalam sektor pertanian yang memiliki keterbatasan. Hal ini mengakibatkan terbatasnya peluang untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, adanya keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan, sekolah, dan infrastruktur ekonomi juga turut berperan dalam memperburuk kondisi kemiskinan. Infrastruktur yang tidak memadai mempersulit akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi bagi masyarakat, Masyarakat miskin umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang membatasi akses mereka terhadap pekerjaan yang layak dan pendapatan yang stabil. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berdampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Indonesia. Upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan perlu menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia (Ashari et al., 2024).

Gambar 1. 4 Persentase Penduduk Miskin Di Jawa Timur Tahun 2016-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan gambar 1.4 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2025, menunjukkan adanya pola penurunan kemiskinan secara bertahap, meskipun perubahannya tidak selalu stabil di setiap wilayah. Secara umum, sebagian besar kabupaten/kota mengalami penurunan dalam jangka panjang, namun sempat terjadi peningkatan pada periode pandemi COVID-19 sekitar tahun 2020-2021 sebelum kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Jika dilihat secara komparatif antar wilayah, tingkat kemiskinan di kabupaten cenderung lebih tinggi daripada di kota. Wilayah seperti Probolinggo, Sampang, Bangkalan, dan Sumenep secara konsisten berada pada kelompok dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi sepanjang periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut masih menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan akses ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta peluang kerja yang lebih terbatas daripada wilayah yang lebih maju.

Sebaliknya, beberapa kabupaten lain memperlihatkan kondisi yang relatif lebih baik dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Misalnya Tulungagung, Banyuwangi, dan Sidoarjo yang menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki perkembangan ekonomi dan kesempatan kerja yang relatif lebih baik sehingga mampu menekan angka kemiskinan secara bertahap. Sementara itu, wilayah Madura seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep masih menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada rata-rata provinsi. Meskipun terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan dengan wilayah lain di Jawa Timur masih terlihat cukup jelas. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang dipengaruhi oleh perbedaan infrastruktur, tingkat pendidikan, serta struktur ekonomi daerah.

Pada wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin cenderung lebih rendah dan relatif stabil. Kota-kota seperti Malang, Surabaya, dan Batu menunjukkan tingkat kemiskinan yang paling kecil daripada daerah lain. Hal ini berkaitan dengan tingginya aktivitas ekonomi, ketersediaan lapangan kerja yang lebih beragam, serta akses pendidikan dan fasilitas publik yang lebih baik di wilayah perkotaan daripada provinsi, tingkat kemiskinan Jawa Timur secara keseluruhan mengalami penurunan dari waktu ke waktu, meskipun sempat meningkat pada masa pandemi. Setelah periode tersebut, angka kemiskinan kembali menurun hingga tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan, meskipun ketimpangan antar wilayah masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan daerah. Secara keseluruhan, Data

ini memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan di Jawa Timur tidak terjadi secara merata. Wilayah perkotaan dan beberapa kabupaten dengan basis ekonomi yang lebih kuat mampu menurunkan kemiskinan lebih cepat, sementara daerah yang memiliki keterbatasan akses ekonomi masih menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah di Jawa Timur masih menghadapi persoalan ketimpangan wilayah yang memerlukan perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan kondisi empiris yang telah dilakukan, fenomena ketimpangan pembangunan di Jawa Timur menunjukkan kemajuan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan antar daerah. Wilayah perkotaan seperti Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan ekonomi yang relatif lebih pesat karena didukung oleh infrastruktur yang lebih memadai, akses pendidikan yang lebih baik, serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Sejumlah daerah lain masih menghadapi keterbatasan dalam hal akses pendidikan, peluang kerja, dan kegiatan ekonomi sehingga tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan cenderung lebih tinggi. Perbedaan kualitas pendidikan antarwilayah menyebabkan kemampuan sumber daya manusia tidak merata, yang mempengaruhi produktivitas dan kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut semakin memperlebar kesenjangan ketika sebagian angkatan kerja tidak mampu terserap secara optimal di pasar kerja, terutama pada masa perlambatan ekonomi saat pandemi.

Tingginya tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten juga mencerminkan terbatasnya akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi dan hasil pembangunan. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan pembangunan antar

wilayah berlangsung tidak seimbang, dimana sebagian daerah berkembang lebih cepat sementara daerah lainnya tertinggal, Sehingga memperkuat terjadinya ketimpangan pembangunan di Jawa Timur. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh (Hindun, Ady Soejoto, 2019). Menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selanjutnya penelitian oleh Nabila Dewi Putri, (2024) menemukan bahwa Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, yang menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja menentukan tingkat pemerataan pembangunan. Sementara itu penelitian (Ningrum et al., 2020) menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan menunjukkan keterbatasan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan hasil pembangunan, Sehingga memperkuat kesenjangan antarwilayah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan merupakan faktor yang memiliki keterkaitan dengan ketimpangan pembangunan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing variabel dapat berbeda pada setiap wilayah dan periode penelitian. Oleh karena itu, Penelitian pengaruh pendidikan, Tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan pembangunan di Jawa Timur menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketiga variabel mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Berdasarkan celah penelitian, kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antara daerah. Dengan menganalisis pengaruh pendidikan, tingkat pengangguran

terbuka, dan Tingkat Kemiskinan secara simultan. Penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara variabel tersebut dalam pembangunan regional. Hasil analisis dapat menjadi landasan objektif dan berbasis data bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, dalam upaya mengurangi kesenjangan antar kabupaten/kota. Selain itu penelitian ini juga dapat mendukung penyusunan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah yang menjadi isu penting dalam proses pembangunan di Jawa Timur. Daerah seperti Surabaya dan Sidoarjo menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi yang relatif tinggi, masih terdapat wilayah lain yang tingkat pembangunannya tertinggal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh kabupaten/kota sehingga dapat menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antar daerah. Dengan demikian penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan, yang berkaitan dengan pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran empiris mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap ketimpangan pembangunan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Jawa Timur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan, Tingkat pengangguran terbuka, dan Kemiskinan secara parsial terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan, Tingkat pengangguran terbuka, dan Kemiskinan secara simultan terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/kota di Jawa Timur?
3. Manakah di antara variabel pendidikan, Tingkat pengangguran terbuka, dan Kemiskinan yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/kota di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh secara parsial antara pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh secara simultan antara pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Jawa Timur.
3. Untuk mengidentifikasi dan menentukan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan di antara Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang berhubungan dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Jawa Timur”.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- 1) Dalam bidang akademis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Jawa Timur
- 2) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pendidikan, pengangguran, dan Kemiskinan sebagai determinan ketimpangan pembangunan antar wilayah.
- 3) Bagi pemerintah, penelitian ini Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata, dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi pengangguran, serta menekan kemiskinan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan agar tidak menyimpang dari masalah utama, agar penelitian lebih terarah, dan memudahkan pembahasan untuk mencapai tujuan penelitian. Beberapa batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini mencakup seluruh wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel independen yaitu Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Kemiskinan, serta variabel dependen yaitu Ketimpangan Pembangunan yang di ukur melalui Indeks Williamson.
3. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel (pooled data) selama periode 10 tahun, yaitu dari tahun 2016-2025.
4. Data bersumber sepenuhnya dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.